

BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan sifat data dalam penelitian ini maka digunakan metode deskriptif. Terkait dalam penelitian ini, maka penelitian deskriptif ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam kemudian dilakukan analisis dan menggambarkan implementasi kebijakan Permendiknas No. 70 tahun 2009 di provinsi Sulawesi Selatan terkait pemerataan sekolah inklusi di provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Whitney (Nasir, 2009: 54) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik evaluative. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antar satu faktor dengan faktor yang lain.

Penelitian deskriptif ini diarahkan untuk mengidentifikasi situasi pada waktu penyelidikan (investigasi) dilakukan, melukiskan variable atau kondisi “apa yang ada” dalam situasi (Surakhmad, 1980; Donald, 1982; Rachmat, 1989; dan Nasution, 1992). Dari kepustakaan tersebut juga dijelaskan karakteristik penelitian deskriptif sebagai berikut:

1. Penelitian deskriptif menuturkan sesuatu secara sistematis tentang data atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat, serta menganalisis dan menginterpretasikan data yang ada;
2. Penelitian deskriptif lebih menekankan pada observasi dan suasana

Fachri Mazhud, 2013

Implementasi Kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Di Provinsi Sulawesi Selatan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

alamiah (*natural setting*), ia mencari teori (*Hypothesis-generating*) dan bukan menguji teori (*Hypothesis-testing*), serta *heuristic* bukan *verivikatif*;

3. Terdapat beberapa jenis penelitian deskriptif, antara lain: studi kasus (*case study*), survei, studi peningkatan (*development study*), studi perkembangan (*longitudinal study*), studi tindak lanjut (*follow-up studies*), analisis dokumen (*document analysis*), analisis kecenderungan (*trend analysis*), analisis tingkah laku (*behavior analysis*), studi waktu dan gerak (*time and motion studies*), dan studi korelasional (*correlational study*).

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa substansi penelitian ini tidak dirancang untuk menguji hipotesis, tetapi hanya mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan fenomena-fenomena simbolik dan merefleksikan secara apa adanya, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengutamakan teknik studi deskriptif.

Studi deskriptif dalam penelitian ini merupakan studi eksplorasi yang difokuskan pada penelaahan lokasi penelitian sebagai pra-kondisi dalam memperoleh informasi tentang kondisi faktual

Sulawesi Selatan.

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan alat untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Dalam usaha untuk mengejar atau memperoleh kebenaran diperlukan suatu cara pendekatan pada fakta-fakta

empiris agar dapat dipahami dalam suatu keteraturan. Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau cara yang diambil untuk menuju sesuatu sasaran. Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan juga dapat diartikan sebagai *to come near to in any sense* atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berdasarkan teori-teori atau generalisasi tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2010: 9). Selain itu, masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 2010: 238).

Berdasarkan fokus, tujuan, subjek penelitian dan karakteristik data maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dan

Sulawesi Selatan.

Teknik penelitian melalui pengungkapan banyak cerita yang bersifat ideosinkratis namun penting, yang diceritakan oleh orang-orang yang ada dilapangan, tentang peristiwa-peristiwa nyata dengan cara-cara yang alamiah.

Karena itu akan diusahakan keterlibatan peneliti, namun tanpa intervensi terhadap variable-variabel proses yang sedang berlangsung apa adanya.

Penelitian ini disebut penelitian naturalistik, karena situasi lapangan penelitian bersifat “*natural*” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa manipulasi yang diatur dengan eksperimen atau test.

Dengan penelitian ini maka apa yang terlaksana dilapangan, dianalisis dan dievaluasi berdasarkan suatu kriteria tertentu sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi fokus. “Dalam hal ini masalah penelitian merupakan fokus penelitian”, (Nasution, 1998: 9). Lebih jauh ciri-ciri pokok dari penelitian kualitatif (*Qualitative Inquiry*) menurut Patton (2002: 40-41) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Naturalistic Inquiry*
2. *Inductive analysis*
3. *Holistic perspective*
4. *Qualitative data*
5. *Personal contact and insight*
6. *Dynamic system*

7. *Unique case orientation*
8. *Context sensitivity*
9. *Emphatic neutrality*
10. *Design flexibility.*

Dari pendapat di atas nampak bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan kecermatan dalam pelaksanaannya, hal ini tidak lain karena setting alamiah perlu tetap terjaga agar data yang diperoleh dapat benar-benar menunjukkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Selain itu analisis dilakukan bersifat induktif dari hal-hal khusus berdasarkan fakta lapangan untuk kemudian dipahami dan ditafsirkan dalam konteks keseluruhan kejadian yang bersifat holistik, serta data yang dikumpulkan merupakan data yang berkategori kualitatif.

Di samping itu penelitian kualitatif juga menunjukkan suatu penelitian yang menunjukkan penggunaan manusia sebagai alat dalam pengumpulan data dengan titik berat kepada proses ketimbang hasil dari suatu fenomena lapangan dan karena apa yang terjadi di lapangan banyak yang sulit atau tidak mungkin diperkirakan sebelumnya maka desain penelitian ini bersifat fleksibel dalam arti memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nasir, 2009: 84). Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian, maka diperlukan suatu desain

penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan.

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi mengenai kejadian yang telah terjadi di provinsi Sulawesi Selatan dengan mendasarkan diri pada konsep-konsep yang ada pada teori yang diperoleh dari studi pustaka, dilakukan identifikasi mengenai impementasi kebijakan, memaparkan faktor pendukung dan penghambat realisasi kebijakan pendidikan inklusif, serta implementasi diseminasi Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. Desain Penelitian

C. Defenisi Konsep

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Fachri Mazhud, 2013

Implementasi Kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Di Provinsi Sulawesi Selatan

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan pertemuan yang kedua bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005: 427). Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai “evaluasi”. Browne dan Wildavsky (Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (Nurdin dan Usman, 2004).

Sedangkan menurut Susilo (2007: 174) “implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap”. Dalam Oxford Advance Learner Dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah *put something into effect* (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).

Dari beberapa definisi di atas, maka disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk penerapan ide, konsep, kebijakan, dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak dalam bentuk perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap dalam suatu proses interaksi.

2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan adalah istilah yang digunakan untuk merangkum rancangan dasar, dan langkah-langkah kecil. Istilah kebijakan juga sering untuk menjamin dan menambah legitimasi dan kadang-kadang untuk menghindari penetapan tindakan: ini harus dilakukan karena merupakan kebijakan pemerintah, spesifikasi dan artikulasi kebijakan dapat menjadi hal yang menarik dalam cara pandang ke depan. Implementasi kebijakan harus dimulai pada manajemen puncak dan kebijakan harus disampaikan oleh kekuatan kerja yang secara kritis dapat menghindari kegagalan untuk mencapai tujuan.

Efektivitas pembuatan kebijakan adalah kesamaan dan penerimaan dari sasaran dari semua level untuk meningkatkan peluang pencapaian sasaran organisasi dan tidak menghamburkan energi dalam konflik. Van Velzen, et al 1985:126 (Syafaruddin, 2008:125).

Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. (UU No. 20 tahun 2003).

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan-keputusan atau regulasi yang menjelaskan sebab akibat dan dengan mengatur kinerja

sebuah kebijakan yang berkaitan dengan upaya penyempurnaan pendidikan dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui upaya pembangunan manusia seutuhnya supaya siap menghadapi tantangan masa depan. Implementasi kebijakan dalam organisasi pendidikan bertitik tolak pada reformasi yang dapat mengoreksi, visi, misi dan fungsi pendidikan yang dikonstruksi secara konseptual dalam kriteria keefektifan organisasi.

3. Konsep Pendidikan Inklusif

Menurut Tim pendidikan inklusif Jawa Barat (2003: 4) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah:

Layanan pendidikan yang mengakomodasi semua anak termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk dapat sekolah di sekolah atau lembaga pendidikan (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak) bersama dengan teman-teman sebayanya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh anak.

Sedangkan menurut Sunanto (2004: 3) dalam tulisannya menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah:

Pendidikan yang memberikan layanan kepada setiap anak tanpa terkecuali. Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya. Semua anak belajar bersama-sama, baik di kelas/ sekolah formal maupun nonformal yang berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak.

Apabila ditinjau dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa model pendidikan inklusif yang dituangkan dalam sebuah organisasi sekolah inklusi dapat diartikan sebagai sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan

program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil. Oleh karena itu, implementasi pendidikan inklusif adalah aktivitas pelaksanaan, penerapan dan evaluasi pendidikan yang memberikan pelayanan terhadap semua anak tanpa memandang kekurangan dan kelemahan anak agar dapat belajar bersama-sama, baik di kelas/luar kelas sekolah formal maupun nonformal yang berada di tempat tinggalnya disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masing-masing anak.

4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Adalah suatu cara atau tindakan dalam bentuk fisik maupun psikis yang mendukung implementasi pendidikan inklusif.

5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Adalah suatu cara atau tindakan dalam bentuk fisik maupun psikis yang menghambat implementasi pendidikan inklusif.

D. Lokasi, Waktu dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan pada dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pendidikan DPRD provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan terhitung mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2013. Adapun informan penelitian ini adalah praktisi pendidikan (para kepala Dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan, Kepala dinas Pendidikan Kabupaten kota yang telah direkomendasikan, serta ketua komisi pendidikan

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan) baik yang belum dan yang telah memperoleh pemahaman tentang pendidikan inklusif atau telah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif serta telah menjalankan proses implementasi pendidikan inklusif.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen

Dalam kaitannya dengan teknik pengumpulan data, Rahardjo (2011), mengemukakan bahwa pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mewawancarai para responden yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan pedoman wawancara agar tidak keluar dari fokus yang telah ditentukan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara bersifat uraian kata. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan terhadap praktisi pendidikan dari dinas pendidikan kemudian dilakukan kroscek kepada penyelenggara pendidikan inklusif di beberapa kepala sekolah sekolah yang direkomendasikan atau ditunjuk oleh pihak dinas pendidikan

provinsi Sulawesi Selatan. Sasaran-sasaran wawancara dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a). Wawancara terhadap kepala dinas pendidikan provinsi atau yang mewakili dalam hal ini praktisi dinas pendidikan yang telah memahami implementasi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Tentang pendidikan Inklusif di provinsi Sulawesi Selatan untuk memperoleh data-data tentang kondisi faktual implementasi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Tentang pendidikan Inklusif di provinsi Sulawesi Selatan, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Tentang pendidikan Inklusif serta memperoleh informasi berkaitan dengan desain implementasi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 yang sesuai kebutuhan di provinsi Sulawesi Selatan.
- b). Wawancara terhadap beberapa kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dalam hal ini *stake holder* di lapangan yang menjadi aktor penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk sebagai penyelenggara oleh pihak dinas pendidikan provinsi dan telah memahami implementasi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Tentang pendidikan Inklusif di provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini untuk memperoleh data-data tentang kondisi faktual implementasi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Tentang pendidikan Inklusif di provinsi Sulawesi Selatan, faktor-faktor pendukung dan penghambat serta memperoleh informasi berkaitan dengan desain implementasi

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 yang sesuai kebutuhan di provinsi Sulawesi Selatan.

- c). Wawancara terhadap ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh ketua komisi pendidikan DPRD Sulawesi Selatan sebagai pemangku kebijakan dan sebagai pengemban implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Tentang pendidikan Inklusif di provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara terhadap salah satu anggota DPRD yang telah memahami mengenai implementasi Pendidikan Inklusif diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kondisi faktual implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 serta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui di lapangan pada proses implementasinya.

Dalam melakukan penelitian kualitatif, digunakan wawancara yang tidak berstruktur dan lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan, sikap dan keyakinan subyek/informan atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subyek. Wawancara dilakukan terhadap individu (pemerintah daerah dari dinas pendidikan terkait dengan pendidikan inklusif) dan kepala-kepala sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Selatan) dengan maksud untuk memperoleh informasi implementasi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Tentang pendidikan Inklusif sebagai upaya pemerataan sekolah inklusif di provinsi Sulawesi Selatan.

2. Teknik Observasi

Observasi digunakan selama penelitian berlangsung untuk mencermati beragam fenomena sejak tahap studi orientasi suasana lingkungan penelitian, implementasi, sampai evaluasi hasil. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan implementasi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Tentang pendidikan Inklusif.

Adapun observasi tersebut bersifat langsung non partisipatori, artinya dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan sehingga tidak mempengaruhi kealamian dari segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi dilakukan sistematis terhadap perilaku dan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan terhadap sekolah-sekolah yang telah menyelenggarakan sekolah inklusi.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Teknik dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada. Teknik ini lebih mudah dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain. Alasan mengapa metode ini lebih baik digunakan untuk penelitian sebagaimana yang diungkapkan Riyanto (1996: 83) adalah sebagai berikut: (1) dokumen merupakan sumber yang stabil, (2) berguna sebagai bukti untuk pengujian, (3) sesuai untuk penelitian kualitatif, (4) tidak reaktif, sehingga tidak sukar

ditemukan dalam teknik kajian isi, dan (5) hasil pengkajian isi akan membuka sesuatu yang diselidiki.

Data dokumentasi baik dalam bentuk visualisasi maupun dokumen tertulis digunakan sebagai data pendukung, melengkapi dan mempertegas data hasil wawancara dan observasi tentang kondisi faktual implementasi, faktor pendukung dan penghambat implementasi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 serta desain implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 yang sesuai kebutuhan di provinsi Sulawesi Selatan. Peneliti memanfaatkan visualisasi dan dokumen-dokumen tertulis yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Dalam pengambilan visualisasi dan dokumen-dokumen tertulis, peneliti berusaha menjaga keaslian dari gambar dan data tertulis yang diambil.

Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 dan dokumen-dokumen sekolah terkait dengan pemerataan pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mengumpulkan data berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka data yang dihasilkan berupa gambaran implementasi kebijakan, memaparkan kondisi faktual implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat realisasi, serta bagaimana desain implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang sesuai kebutuhan dan yang sebaiknya dilakukan di provinsi Sulawesi Selatan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Sumber data dalam penelitian ini dibagi atas dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah realisasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif dalam pelaksanaan di sekolah yang diperoleh melalui dokumen-dokumen sekolah. Sumber data sekunder adalah responden dan informan.

Peneliti menggunakan manusia sebagai instrumen utama yaitu peneliti sendiri, karena instrumen manusia dalam penelitian kualitatif dipandang lebih cermat dan teliti, manusia sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulasi dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bermakna bagi peneliti, manusia sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus, (Nasution, 1998: 55).

Sebagai instrumen utama dalam menjaring data, peneliti juga menggunakan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data berkenaan dengan kondisi faktual, faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 dan bagaimana desain implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif yang sesuai kebutuhan di provinsi Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan kisi-kisi instrument penelitian diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Pertanyaan Penelitian	Aspek/Ruang Lingkup yang Diamati	Indikator	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen Pengumpulan Data	Informan
1	2	3	4	5	6
Kondisi faktual implementasi kebijakan pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009?.	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerataan Pendidikan dan program pendidikan sebagai upaya pencapaian visi dan misi pendidikan. Implementasi Kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 pasal 1 – 4 tentang pemerataan pendidikan inklusif yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> Pihak pemerintah daerah mampu menjelaskan kebijaksanaan pembangunan pendidikan di Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah mampu menjelaskan kebijakan pemerataan pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah mampu menjelaskan visi dan misi pencapaian pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah mampu menjelaskan perkembangan aspek pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah mampu menjelaskan seperti apakah program pendidikan yang mendukung perkembangan pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan. Pihak Pemerintah daerah mampu menjelaskan implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 sebagai upaya pemerataan Pendidikan Inklusif di provinsi Sulawesi Selatan, ditinjau dari aspek: <ol style="list-style-type: none"> Gambaran Perencanaan implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 terkait pemerataan pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan. (seperti; renstra/pola implementasi/rencana aksi/petunjuk teknis) 	Wawancara Observasi Dokumentasi	<p>Pedoman observasi Pedoman wawancara Pedoman dokumentasi</p> <p>Pedoman observasi Pedoman wawancara Pedoman dokumentasi</p> <p>Pedoman wawancara Pedoman observasi Pedoman dokumentasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua Komisi Pendidikan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan).

[Type text]

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Gambaran Mekanisme dan teknis implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (tindakan pemerintah daerah dalam proses implementasi dalam mewujudkan pemerataan sekolah inklusi di provinsi Sulawesi Selatan).</p>		<p>Pedoman wawancara Pedoman observasi Pedoman dokumentasi</p>	
<p>Faktor pendukung dan Penghambat realisasi Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif di provinsi Sulawesi Selatan?</p>	<p>1. Faktor Pendukung implementasi kebijakan pemerataan pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan. 2. Faktor Penghambat implementasi kebijakan pemerataan pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan.</p>	<p>1. Menjelaskan komunikasi dan sosialisasi pemerintah daerah kepada para aktor pelaksana di lapangan dalam kaitan dengan implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. 2. Menjelaskan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. 3. Menjelaskan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. 4. Menjelaskan struktur dan lingkungan birokrasi dalam implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. 5. Menjelaskan dukungan masyarakat dalam implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. 6. Upaya-upaya teknis yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah dalam implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif</p>	<p>Wawancara Observasi Dokumentasi</p>	<p>Pedoman Observasi Pedoman Wawancara Pedoman dokumentasi</p>	<p>Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten</p>

1	2	3	4	5	6
Desain Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif yang sesuai kebutuhan dan sebaiknya dilakukan di provinsi Sulawesi Selatan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kiprah pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan. 2. Desain implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang sesuai kebutuhan dan sebaiknya dilakukan di provinsi Sulawesi Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjelaskan kiprah pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan dan pemerataan pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan. 2. Mampu menyusun desain implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif sebagai upaya pemerataan sekolah inklusi di provinsi Sulawesi Selatan. 	Wawancara Dokumentasi	Pedoman wawancara Pedoman dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala dinas terkait 2. Studi literatur Peneliti

F. Teknik Keabsahan Data (Pengecekan Validitas dan Reliabilitas Data)

Semua bentuk penelitian memerlukan keabsahan data yang dapat dibuktikan dengan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif untuk mengukur keabsahan data tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln & Guba (1985: 289) berikut ini: “Validitas internal yang dinyatakan dalam kredibilitas (*credibility*), validitas eksternal yang dinyatakan dalam *transferability*. Reliabilitas dinyatakan dalam *dependability* dan objektivitas yang dinyatakan dalam *confirmability*”.

1. *Credibility*

Credibility (kepercayaan) adalah mengusahakan agar hasil-hasil penelitian dapat dicapai kebenarannya oleh peneliti untuk kenyataan ganda yang sedang diteliti atau kepercayaan penemuan yang dapat dicapai atau dengan kata lain kesesuaian antara konsep peneliti dengan konsep responden. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara memperpanjang waktu penelitian sehingga penemuannya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk keabsahan data diperlukan keikutsertaan peneliti dalam penelitian. Dengan demikian, peneliti akan dapat mempelajari seluk beluk dari penelitian itu sendiri secara terperinci dan dijamin kebenarannya.

2. *Persistence Observation*

Ketelitian/ketekunan dalam pengamatan akan menghasilkan kedalaman data yang diinginkan sehingga data yang dibutuhkan lebih akurat.

3. *Triangulation*

Triangulation (trianggulasi) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, yaitu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Trianggulasi adalah proses untuk memeriksa kebenaran data dengan cara membandingkan dengan data yang didapat dari sumber lain pada berbagai tahapan penelitian di lapangan, pada waktu yang berbeda dengan memakai metode yang berbeda pula.

4. *Peer Debriefing*

Peer Debriefing dimaksud adalah untuk menjelaskan hasil sementara dari hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

5. *Referential Adequacy*

Referential Adequacy adalah untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi.

6. *Negative Case Analysis*

Negative Case Analysis, teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding.

7. *Member Check*

Member Check adalah pengecekan sumber utama dalam proses pengumpulan data.

8. *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif, *transferability* adalah kemampuan melihat sampai sejauhmana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain. Sehubungan dengan *transferability* ini, Nasution (1992: 119) mengemukakan bahwa: “bagi peneliti kualitatif, *transferability* bergantung pada si pemakai, yaitu hingga manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu”

9. *Dependability*

Dependability (ketergantungan) adalah ingin melihat seberapa jauh hasil penelitian bergantung pada keandalan.

10. *Confirmability*

Confirmability adalah keyakinan terhadap data yang diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara *audit trail*. Artinya, dapat dikonfirmasi dengan jejak yang dapat diikuti. Untuk dapat melakukan pemeriksaan ini, peneliti mempersiapkan bahan-bahan berikut: (1) data mentah, berupa catatan lapangan, (2) hasil analisis data berupa rangkuman, (3) catatan mengenai proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Karena data yang diperoleh lebih bersifat kualitatif, maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif (Strauss, 1990). Selanjutnya Miles dan Huberman (1984: 27) menjelaskan bahwa menganalisis data secara kualitatif sangat sulit disebabkan karena metode dan instrument-instrumen belum dapat dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti merupakan proses yang berkesinambungan yaitu mulai saat pengambilan data, dimana data sudah diolah dan dimaknai, triangulasi untuk menjaga keotentikan informasi, pemaknaan dilakukan dengan berpijak pada teori dan dalil yang bersumber dari referensi yang relevan. Dilakukannya rumusan kesimpulan dan diajukannya model atau desain implementasi diseminasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini terdapat dua corak yang akan dianalisis. Pertama, analisis saat mempertajam keabsahan data, melalui “*simultaneous cross sectional*”, dan kedua melalui interpretasi pada data secara keseluruhan. Pada analisis corak pertama, dilakukan penyusunan data, yakni penyusunan kata-kata hasil wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

Berdasarkan data yang diperoleh, dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. Dalam penelitian ini, data tidak dianggap sebagai *error reality* yang dipersalahkan oleh teori sebelumnya, tetapi dianggap sebagai *another reality* (Stuart A. Sehlegel, 1984: 12). Dalam hal ini peneliti mencatat data apa adanya, tanpa intervensi dari teori atau paradigma peneliti selama ini dimiliki. Situasi wajar, apa adanya (*natural setting*) dijadikan bahan penelitian yang dimasuki peneliti tanpa intervensi situasi, baik melalui bentuk angkat, tes atau eksperimen.

Namun demikian peneliti berusaha mencari makna inti dari kelakuan dan perbuatan yang terlihat. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami gejala dan kelakuan tersebut dalam konteks yang lebih luas, dipandang dari kerangka pikiran dan perasaan si pelaku. Berdasarkan hal tersebut, data yang didapat merupakan data yang langsung dari tangan pertama, tanpa melalui tes atau angket yang pada gilirannya hal tersebut justru membuat jarak dengan sumber data (Nasution, 1988: 9-10).

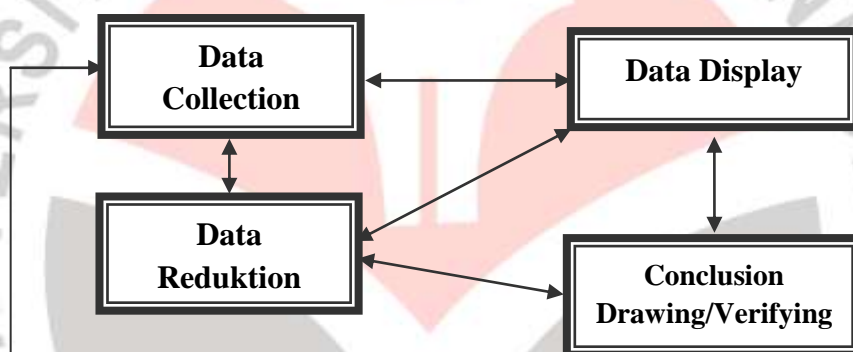
Dalam menganalisis data (diadopsi dari Moleong, 2009: 247) berbagai langkah-langkah yang digunakan, sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian kepustakaan.
2. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti berkaitan dengan kondisi faktual implementasi kebijakan, memaparkan faktor pendukung dan penghambat realisasi serta desain implementasi desiminasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 pasal tentang pendidikan inklusif..
3. Langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan sambil melakukan *koding* data. *Koding* data yang dibuat berdasarkan instrumen analisis yang telah disusun. Hasil *koding* data selanjutnya akan dianalisis gambaran faktual implementasi kebijakan, memaparkan faktor pendukung dan penghambat realisasi

kebijakan serta gambaran desain implementasi diseminasi permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif.

4. Langkah terakhir adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data, untuk selanjutnya menjadikan hasil analisis data sebagai acuan untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif.

Adapun skema analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini tergambar pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.2. Langkah-Langkah Analisis Data Kualitatif

Sumber: Miles dan Huberman (1984: 16)

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian kualitatif menurut beberapa sumber, antara lain, Bogdan (1972) dan Moleong (1990) mengemukakan ada tiga tahapan dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) pra lapangan, (2) kegiatan lapangan, dan (3) analisis intensif. Berikut dikemukakan langkah-langkah penelitian yang dilakukan di lapangan, meliputi delapan tahapan dari *pra survey* sampai tahap pengujian data hasil penelitian.

1. *Pra Survey*/orientasi

Hal ini dilakukan peneliti melalui observasi kegiatan terkait di lapangan dan dialog dengan pimpinan dinas pendidikan sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif di provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dilanjutkan dengan observasi diiringi dengan dialog dengan informan lain yang dipandang perlu dan dapat memberikan penambahan informasi guna lebih memberikan pemahaman akan masalah yang menjadi fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada para pejabat yang dapat memberikan pedalaman akan masalah yang menjadi fokus penelitian. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum. Pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara dikomparasikan dengan studi dokumentasi dan observasi.

3. Diskusi

Dalam rangka lebih menangkap ide-ide yang dikemukakan para responden/yang diwawancarai, peneliti juga akan melakukan diskusi secara berkesinambungan dengan informan/responden yang berada di pemerintahan. Diskusi ini sifatnya berkesinambungan, selama terjun ke lapangan dan selam penulisan. Ini dilakukan juga untuk triangulasi data.

4. Triangulasi

Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi tidak langsung ini dilakukan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian, yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut ditarik benang merah yang menghubungkan antara berbagai fenomena kejadian.

5. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk memperkuat apa yang terjadi, dan sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan hasil wawancara.

6. Observasi langsung

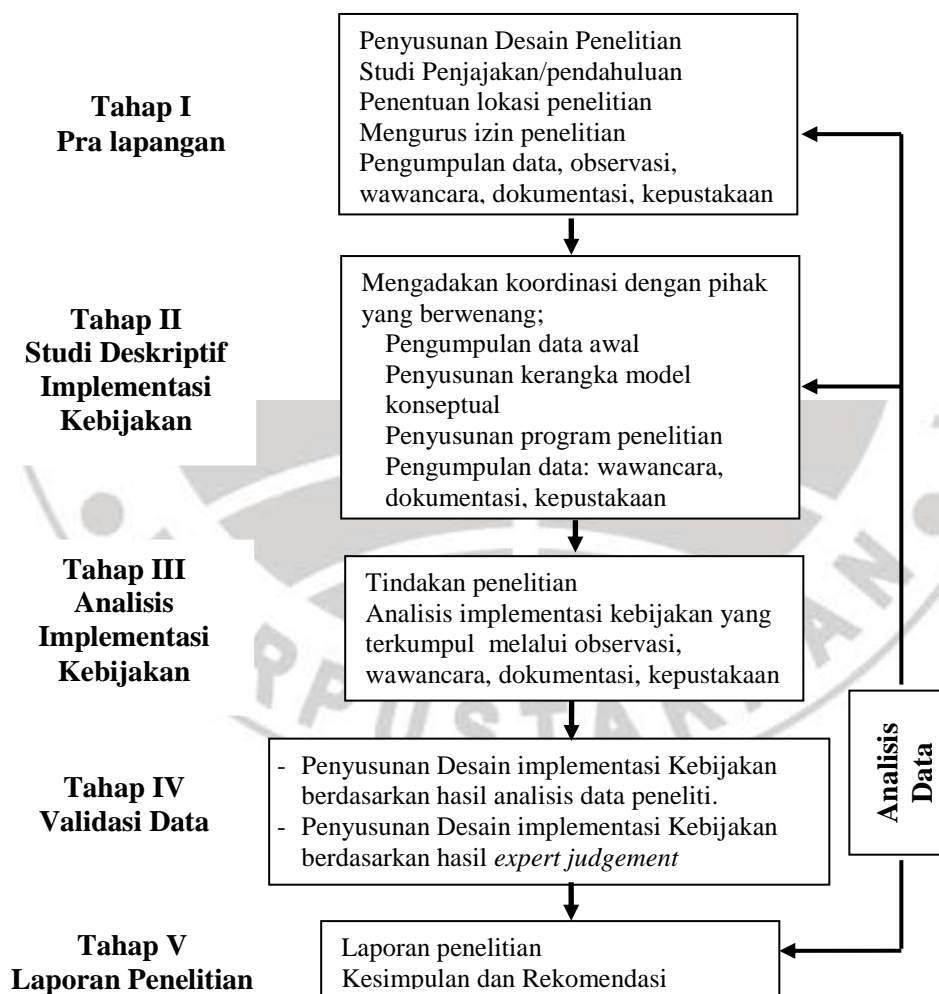
Observasi dilakukan pertama terhadap seluruh aktivitas pengawasan, yang dilakukan para pejabat di Dinas Pendidikan, kemudian setelah observasi yang bersifat keseluruhan ini diperoleh data-data yang bersifat umum maka peneliti akan lebih memfokuskan observasi pada kegiatan-kegiatan yang langsung terkait dengan fokus penelitian. Kemudian data hasil observasi dikomparasikan dengan studi dokumentasi, sebagai upaya untuk melihat konsistensi serta kesinambungan informasi yang diperoleh, sehingga layak dan dapat benar-benar menunjukkan fenomena yang sebenarnya.

7. Pengolahan data

Berdasarkan penulisan kembali baik dari alat rekam maupun dari alat tulis, peneliti mengkategorisasi dan mengklarifikasi data. Pengolahan

demikian dilakukan tidak secara simultan saat seluruh pendapat dari responden sudah terkumpul, tapi akan dilakukan setahap demi setahap, seiring dengan muncul dan berkembangnya masalah baru. Amat dimungkinkan subjek penelitian tidak mendapatkan materi wawancara yang sama. Hal ini berkaitan dengan pedalaman objek materi dari penelitian itu sendiri.

Tahap-tahap pelaksanaan penelitian di lapangan, secara kronologis dikemukakan sebagaimana tersaji pada gambar 3.3 berikut ini:



Gambar 3.3. Tahap-tahap Pelaksanaan Penelitian